SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *REMAIN IN MEXICO* DI ERA JOE BIDEN DALAM MENANGANI KRISIS IMIGRAN DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO 2021–2024

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh:

Irta Nabila
NIM. E1111191076

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *REMAIN IN MEXICO* DI ERA JOE BIDEN DALAM MENANGANI KRISIS IMIGRAN DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO 2021–2024

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh:

Irta Nabila
NIM. E1111191076

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REMAIN IN MEXICO DI ERA JOE BIDEN DALAM MENANGANI KRISIS IMIGRAN DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO 2021-2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Irta Nabila
NIM. E1111191076

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A. Tanggal: 7 - 2 - 2026
NIP. 199212172020121008

Dosen Pembimbing ~~Pendamping~~

Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., M.A. Tanggal: 6 - 2 - 2026
NIDN. 0028119007

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *REMAIN IN MEXICO* DI ERA JOE BIDEN DALAM MENANGANI KRISIS IMIGRAN DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO 2021–2024

Oleh:

Irta Nabila
NIM. E1111191076

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juli 2026
Waktu : 09.00
Tempat : Ruang Sidang R1

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A.	Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., M.A.
NIP. 199212172020121008	NIP. 199011282025211039
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Ully Nuzulian, S.IP., M.Si.	Adityo Darmawan Sudagung, S.H.Int. M.I.Pol.
NIP. 198007302003122002	NIP. 199007232019031011

5/10/26

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Universitas Tanjungpura

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Presiden Joe Biden dalam menangani krisis imigran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko periode 2021–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya arus migran dan pencari suaka di wilayah perbatasan serta dinamika kebijakan *Remain in Mexico* yang mengalami penghentian, pengaktifan kembali melalui proses hukum, hingga penghentian kembali selama masa pemerintahan Joe Biden. Dinamika tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, sehingga efektivitas kebijakan dalam menangani krisis migran perlu dikaji. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, laporan *U.S. Customs and Border Protection* (CBP), *U.S. Department of Homeland Security* (DHS), serta berbagai sumber ilmiah dan media yang relevan. Analisis penelitian menggunakan konsep efektivitas kebijakan internasional menurut Arild Underdal (1992) melalui tiga indikator, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*, serta *Foreign Policy Analysis* (FPA) sebagai pendekatan pendukung untuk menjelaskan dinamika pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden masih terbatas. Dari aspek *output*, implementasi kebijakan mengalami dinamika berupa penghentian, pengaktifan kembali melalui proses hukum, dan penghentian kembali, yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya. Dari aspek *outcome*, implementasi kebijakan belum menghasilkan perubahan yang cukup signifikan dalam penanganan kondisi migrasi dan tekanan terhadap sistem imigrasi di perbatasan. Sementara itu, dari aspek *impact*, kebijakan belum menunjukkan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pengelolaan keamanan perbatasan maupun penyelesaian krisis migran secara berkelanjutan. Melalui perspektif FPA, dinamika tersebut dapat dipahami dalam konteks proses hukum, pertimbangan keamanan dan kemanusiaan, tekanan politik domestik, serta hubungan Amerika Serikat-Meksiko yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konsistensi dalam perumusan dan implementasi kebijakan migrasi, penguatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan migrasi dan perlindungan terhadap hak-hak migran.

Kata kunci: Efektivitas, *Remain in Mexico*, Joe Biden, Krisis Imigran, Amerika Serikat-Meksiko.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Remain in Mexico policy during the administration of President Joe Biden in addressing the migrant crisis at the United States-Mexico border during the 2021–2024 period. This study is motivated by the high flow of migrants and asylum seekers at the border, as well as the policy dynamics of Remain in Mexico, which involved its termination, reinstatement through legal proceedings, and subsequent termination during the Biden administration. These dynamics indicate changes in the policy-making and implementation processes, thereby highlighting the need to examine the policy's effectiveness in addressing the migrant crisis. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through a literature review and documentation, drawing on books, academic journals, official United States government documents, reports from the U.S. Customs and Border Protection (CBP) and the U.S. Department of Homeland Security (DHS), as well as other relevant scholarly and media sources. The analysis applies Arild Underdal's (1992) concept of international policy effectiveness through three indicators: output, outcome, and impact. Foreign Policy Analysis (FPA) is also employed as a supporting approach to explain the dynamics of decision-making and the factors influencing policy implementation. The findings indicate that the effectiveness of the Remain in Mexico policy during the Biden administration remained limited. In terms of output, policy implementation underwent a series of changes, including termination, reinstatement through legal proceedings, and subsequent termination, indicating inconsistencies in its implementation. In terms of outcome, the implementation of the policy did not produce sufficiently significant changes in addressing migration conditions and the pressure on the immigration system at the border. Meanwhile, in terms of impact, the policy did not demonstrate significant long-term effects on border security management or the sustainable resolution of the migrant crisis. From the perspective of FPA, these dynamics can be understood in the context of legal proceedings, security and humanitarian considerations, domestic political pressures, and United States-Mexico relations, which influenced the decision-making and policy implementation processes. This study recommends greater consistency in the formulation and implementation of migration policies, strengthened cooperation between the United States and Mexico, and enhanced interagency coordination in migration management and the protection of migrants' rights.

Keywords: Effectiveness, Remain in Mexico, Joe Biden, Migrant Crisis, United States-Mexico.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Efektivitas Kebijakan Remain in Mexico di Era Joe Biden dalam Menangani Krisis Imigran di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko Tahun 2021–2024.*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya arus migran dan pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko yang mendorong pemerintah Amerika Serikat menerapkan berbagai kebijakan pengendalian migrasi, salah satunya *Remain in Mexico* atau *Migrant Protection Protocols*. Pada masa pemerintahan Joe Biden, kebijakan ini mengalami dinamika berupa penghentian, pengaktifan kembali karena putusan pengadilan, hingga penghentian permanen, sehingga efektivitasnya dalam menangani krisis migran menjadi penting untuk dikaji. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden dalam menangani krisis imigran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko tahun 2021–2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* berdasarkan indikator *output*, *outcome*, dan *impact* menurut Arild Underdal (1992), serta menggunakan Foreign Policy Analysis (FPA) untuk menjelaskan dinamika pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai efektivitas kebijakan migrasi internasional, sedangkan secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian maupun kajian mengenai kebijakan migrasi lintas negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, laporan *U.S. Customs and Border Protection* (CBP), *Department of Homeland Security* (DHS), *International Organization for Migration* (IOM), serta berbagai sumber kredibel lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden masih terbatas.

Dari aspek *output*, implementasi kebijakan mengalami dinamika berupa penghentian, pengaktifan kembali melalui proses hukum, dan penghentian kembali, yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan. Dari aspek *outcome*, implementasi kebijakan belum menghasilkan perubahan yang cukup signifikan dalam penanganan kondisi migrasi dan tekanan terhadap sistem imigrasi di perbatasan. Sementara itu, dari aspek *impact*, kebijakan belum menunjukkan dampak jangka panjang yang signifikan dalam penyelesaian persoalan keamanan perbatasan dan krisis migran. Melalui FPA, dinamika tersebut dapat dipahami dalam konteks proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh proses hukum, pertimbangan keamanan dan kemanusiaan, tekanan politik domestik, serta hubungan Amerika Serikat-Meksiko. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, efektivitas *Remain in Mexico* pada era Joe Biden periode 2021–2024 dapat dikategorikan masih terbatas. Penelitian ini menyarankan perlunya konsistensi dalam perumusan dan implementasi kebijakan migrasi, penguatan koordinasi dan

kerja sama Amerika Serikat-Meksiko, serta peningkatan mekanisme perlindungan dan penanganan migran melalui koordinasi antarlembaga.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Irta Nabila
Nomor Mahasiswa	: E1111191076
Program Studi	: Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



(Irta Nabila)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

A picture of people caught in a storm moving when lightning flashes, freezing when it fades. Not because they can't see, but because they only move when seeing is easy. Without an inner compass, they stop when the world goes dark.

It's a portrait of conditional faith. Belief that only holds when things are comfortable isn't really belief, it's convenience.

(Inspired by Al Baqarah: 19-20)

Persembahan:

1. Kepada diri sendiri atas tekad dan keyakinan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tanggungjawab yang telah di ambil.
2. Kepada kedua orang tua, Irham dan Elsinta yang telah memberikan dukungan dan doa, serta keyakinan penuh kepada penulis.
3. Kepada saudara kandung, Zalfa, Aisha, dan Nabil yang telah memberikan semangat dan dukungan.
4. Kepada dosen pembimbing, Bapak Adibrata Iriansyah, S.IP, M.A selaku pembimbing utama, dan Bapak Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasonal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

6. Kepada Kifa yang selalu menemani dalam berdiskusi, memberikan saran, semangat serta doa.
7. Kepada para sahabat, Kiki, Andra, dan Allie yang selalu menghibur, memberikan dukungan dan semangat serta doa.

Salam Hormat,

Irta Nabila

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan kelancaran dan kemudahan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal yang berjudul "Efektivitas Kebijakan *Remain in Mexico* di Era Joe Biden dalam Menangani Krisis Imigran di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko 2021-2024". Penulisan ini bertujuan untuk menyelesaikan studi tingkat akhir perkuliahan strata 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini karena hasil yang dicapai dari penulisan ini akan menjadi langkah awal bagi peneliti dalam menuntut ilmu untuk kedepannya. Oleh karena itu, besar harapan peneliti agar pembaca dapat memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap proposal ini demi perbaikan yang lebih baik untuk kedepannya.

Selain itu, keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Bapak Dr. Herlan, S.Sos., M.Si..
2. Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si.

3. Dosen Pembimbing Utama, Bapak Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A., yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Pendamping, Bapak Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., M.A., yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Utama, Ibu Ully Nuzulian, S.IP., M.Si., yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
6. Dosen Penguji Kedua, Bapak Adityo Darmawan Sudagung, S.H.Int. M.I.Pol., yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
7. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya.

Pontianak, 13 Januari 2026



Irta Nabila
NIM. E1111191076

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR BAGAN ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 16
1.3. Fokus Penelitian 17
1.4. Rumusan Masalah 17
1.5. Tujuan Penelitian 17
1.6. Manfaat Penelitian 17
1.6.1. Manfaat Teoritis 17
1.6.2. Manfaat Praktis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1. Definisi Konsep Efektivitas 14
2.2. Konsep Efektivitas 17
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 22
2.4. Alur Pikir Penelitian 27

2.5. Pertanyaan Penelitian 28
BAB III METODE PENELITIAN 29
3.1. Jenis Penelitian 29
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 30
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.3.1. Lokasi Penelitian 34
3.3.2. Waktu Penelitian 35
3.4. Unit Analisa, Unit Eksplanasi, dan Level Analisis 35
3.4.1. Unit Analisa 35
3.4.2. Unit Eksplanasi 36
3.4.3. Level Analisis 36
3.5. Teknik Pengumpulan Data 37
3.6. Instrumen Alat Pengumpulan Data 38
3.7. Analisis Data 38
3.7.1. Keabsahan Data 38
3.7.2. Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 41
4.1. Amerika Serikat dan Kebijakan Imigrasi pada Era Joe Biden 41
4.1.1. Profil dan Kondisi Amerika Serikat 42
4.1.2. Kebijakan Imigrasi dan *Remain in Mexico* pada Era Joe Biden 43
4.2. Dinamika Migrasi di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko 49
4.2.1. Arus Migrasi dan Pencari Suaka 50
4.2.2. Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi 53
4.3. Karakteristik dan Permasalahan Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko 57
4.3.1. Kondisi Geografis dan Karakteristik Perbatasan 58
4.3.2. Permasalahan Migrasi dan Keamanan di Perbatasan 66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 71
5.1. *Output* (Implementasi Kebijakan) *Remain in Mexico* pada Era Joe Biden 2021–2024 72
5.1.1. Implementasi Kebijakan *Remain in Mexico* pada Era Joe Biden 72
5.1.2. Analisis *Output* Berdasarkan Konsep Underdal 76

5.2. *Outcome* (Efektivitas Kebijakan) *Remain in Mexico* dalam Menangani Krisis Migran di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada Era Joe Biden 2021–2024 79
5.2.1. Efektivitas Kebijakan *Remain in Mexico* dalam Menangani Krisis Migran 80
5.2.2. Analisis *Outcome* Berdasarkan Konsep Underdal 84
5.3. *Impact* (Dampak Kebijakan) *Remain in Mexico* terhadap Keamanan Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada Era Joe Biden 2021–2024 88
5.3.1. Dampak Kebijakan *Remain in Mexico* terhadap Keamanan Perbatasan 90
5.3.2. Analisis *Impact* Berdasarkan Konsep Underdal..... 93
BAB VI PENUTUP 97
6.1. Simpulan 97
6.2. Saran 98
6.3. Keterbatasan Penelitian 100
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1. 1 Perbandingan Krisis Imigran Amerika Serikat-Meksiko Era Trump (2017–2020) 5
1. 2 Perbandingan Kebijakan Imigrasi Donald Trump dan Joe Biden 7
1. 3 Kasus Kriminal Terkait Migrasi di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko Tahun 2021–2024 14
2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan 25
3. 1 Waktu Penelitian 35
4. 1 Kronologi Implementasi Kebijakan Remain in Mexico Tahun 2019–2022 48

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2. 1 Alur Pikir Penelitian 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4. 1 Peta Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Riwayat Hidup Peneliti 111
2. Surat Tugas Penelitian..... 112

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, kebijakan luar negeri atau *foreign policy* memiliki beragam definisi. Merujuk pada buku *Foreign Policy in a Transformed World* karya Mark Webber dan Michael Smith, kebijakan luar negeri dipahami sebagai rangkaian unsur yang mencakup nilai-nilai yang dianut, upaya untuk mencapai tujuan tertentu, serta proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan negara dalam menjalankan hubungan dengan negara lain (Webber dan Smith, 2002). Definisi yang dikemukakan oleh Mark Webber dan Michael Smith menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya terbatas pada tindakan negara di tingkat internasional, tetapi juga mencerminkan nilai dan kepentingan yang dianut oleh negara tersebut.

Kebijakan luar negeri sendiri merupakan serangkaian tindakan dan strategi yang digunakan negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam ilmu hubungan internasional (Holsti, 1995). Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri tidak hanya berkaitan dengan diplomasi dan keamanan, tetapi juga mencerminkan nilai, kepentingan, dan orientasi politik suatu negara terhadap berbagai isu global, termasuk isu migrasi internasional. Dalam konteks Amerika Serikat, kebijakan imigrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mengelola hubungan dengan negara-negara tetangga, khususnya Meksiko.

Dalam hubungan Amerika Serikat dan Meksiko, isu migrasi menjadi salah satu persoalan utama yang terus berkembang, terutama di wilayah perbatasan kedua negara. Kawasan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko merupakan jalur utama migrasi internasional yang digunakan oleh migran dari Meksiko maupun negara negara Amerika Tengah seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Peningkatan arus migrasi tersebut mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk menerapkan berbagai kebijakan pengendalian perbatasan guna menekan migrasi ilegal dan mengelola sistem suaka secara lebih ketat (Chishti dkk., 2024). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan migrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengamanan wilayah, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas pemerintah Amerika Serikat dalam menangani krisis imigran di perbatasan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan perlindungan terhadap pencari suaka.

Pada masa pemerintahan Donald Trump (2017–2021), kebijakan imigrasi Amerika Serikat cenderung bersifat restriktif dan berorientasi pada keamanan perbatasan. Pemerintahan Trump memandang peningkatan arus migran sebagai salah satu persoalan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas domestik Amerika Serikat (Bolter dkk., 2022). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Trump menerapkan berbagai kebijakan ketat seperti pembangunan tembok perbatasan, peningkatan detensi migran, deportasi massal, serta kebijakan *Zero Tolerance Policy* yang menyebabkan pemisahan keluarga migran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko (Baker dan Timm, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan Trump lebih berfokus pada pembatasan migrasi, sementara

dampak terhadap perlindungan kemanusiaan menjadi bagian dari perdebatan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Trump mempercepat pembangunan tembok perbatasan Amerika Serikat hingga ratusan mil serta mendorong Meksiko untuk meningkatkan pengawasan migrasi di perbatasan selatannya, khususnya dengan Guatemala (Dunn dan Ribas-Mateos, 2021). Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan kemanusiaan di wilayah perbatasan, yang ditandai dengan kondisi pusat detensi yang padat, keterbatasan layanan dasar, dan persoalan perlindungan bagi para migran (Baker dan Timm, 2021). Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan migrasi perlu dilihat tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan dan mengelola konsekuensi yang muncul dalam implementasinya.

Selain itu, Trump juga menerapkan kebijakan *Remain in Mexico* atau *Migrant Protection Protocols* pada Januari 2019. Kebijakan tersebut mewajibkan pencari suaka untuk tetap berada di wilayah Meksiko selama proses hukum imigrasi mereka berlangsung di Amerika Serikat (AIC, 2024). Pemerintah Amerika Serikat menilai kebijakan ini diperlukan untuk mengurangi lonjakan pencari suaka dan mencegah penyalahgunaan sistem imigrasi. Namun demikian, kebijakan tersebut menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia karena dinilai menempatkan migran dalam kondisi rentan, minim perlindungan hukum, dan menghadapi ancaman kekerasan di wilayah perbatasan Meksiko.

Krisis migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada era Trump mengalami eskalasi signifikan. Pada tahun fiskal 2019, *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) mencatat lebih dari 851.000 penangkapan migran di perbatasan selatan Amerika Serikat, angka tertinggi dalam satu dekade (CBP, 2019). Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi migrasi tidak hanya berasal dari kebijakan Amerika Serikat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial-politik di negara asal para migran.

Secara umum, pendekatan Trump terhadap krisis perbatasan lebih menekankan pada penegakan hukum dan pencegahan masuknya migran (Dunn dan Ribas-Mateos, 2021). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan migrasi tidak dapat dinilai hanya dari keberhasilan memperketat pengawasan perbatasan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan serta menghasilkan perubahan terhadap kondisi migrasi yang menjadi sasaran kebijakan, sebagaimana terlihat pada perbandingan kondisi krisis imigran Amerika Serikat-Meksiko era Trump berikut ini.

Tabel 1. 1 Perbandingan Krisis Imigran Amerika Serikat-Meksiko Era Trump (2017–2020)

Tahun	Kebijakan Utama	Permasalahan Inti	Dampak Terhadap Imigran
2017	Pengetatan penegakan hukum imigrasi	Overkapasitas pusat detensi dan lambatnya proses suaka	Peningkatan penahanan keluarga dan anak-anak migran
2018	*Zero Tolerance Policy*	Pemisahan keluarga migran secara sistematis	Trauma psikologis anak, pelanggaran HAM, kecaman internasional
2019	*Remain in Mexico*	Pemindahan tanggung jawab ke Meksiko	Migran terjebak di kamp perbatasan tanpa perlindungan
2020	*Title 42* (COVID-19 *border expulsion*)	Pembatasan akses suaka	Deportasi cepat tanpa proses hukum

Sumber: Kerwin, 2018; Baker dan Timm, 2021; Garrett, 2020; Gilman, 2020.

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada era Donald Trump berkembang semakin represif dari tahun ke tahun. Tahun 2017 ditandai dengan pengetatan awal kebijakan imigrasi serta peningkatan penahanan migran dan pencari suaka di fasilitas federal (Kerwin, 2018). Tahun 2018 menjadi titik eskalasi utama melalui penerapan *Zero Tolerance Policy* yang memicu pemisahan keluarga secara sistematis dan dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional (Baker dan Timm, 2021). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan pada era Trump lebih menekankan pembatasan migrasi dibanding perlindungan kemanusiaan.

Pada tahun 2019, kebijakan berfokus pada eksternalisasi penanganan migran melalui *Remain in Mexico*, yang memaksa pencari suaka menunggu proses hukum di wilayah perbatasan Meksiko dalam kondisi tidak aman dan minim perlindungan (Garrett, 2020). Memasuki tahun 2020, krisis tersebut bergeser menjadi krisis hak asasi dan kesehatan publik, ketika pandemi COVID-19 digunakan sebagai justifikasi penerapan *Title 42*, yang secara efektif menutup akses suaka dan memungkinkan deportasi cepat tanpa proses hukum sebagaimana diatur dalam hukum internasional (Gilman, 2020). Perkembangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan imigrasi era Trump lebih mengutamakan keamanan perbatasan dibanding perlindungan kemanusiaan, sehingga menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden.

Perubahan dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat mulai terjadi ketika Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2021. Pemerintahan Biden berupaya mengubah pendekatan imigrasi yang sebelumnya sangat restriktif menjadi lebih moderat dan humanis. Pada awal masa pemerintahannya, Biden menghentikan sejumlah kebijakan era Trump, termasuk *Zero Tolerance Policy*, menghentikan pembangunan tembok perbatasan, serta mengevaluasi kebijakan *Remain in Mexico* (CMS, 2021). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi sistem imigrasi Amerika Serikat yang lebih menekankan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pencari suaka.

Berdasarkan kajian mengenai kebijakan imigrasi pada era Joe Biden, terdapat perbedaan orientasi antara pendekatan Biden dan pendahulunya, Donald Trump. Jika Trump lebih menekankan pengetatan pengawasan perbatasan dan pembatasan

akses suaka, Biden berupaya menggeser kebijakan imigrasi ke arah yang relatif lebih humanis melalui evaluasi kebijakan *Remain in Mexico*, pembentukan jalur migrasi legal, reunifikasi keluarga migran, serta perluasan perlindungan bagi pencari suaka dan kelompok rentan (Putri dan Yuniarti, 2025). Perbedaan karakteristik kebijakan imigrasi pada kedua pemerintahan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Perbandingan Kebijakan Imigrasi Donald Trump dan Joe Biden

Aspek Kebijakan	Donald Trump	Joe Biden	Dampak terhadap Krisis Migrasi
Pendekatan Utama	Restriktif dan berbasis keamanan	Moderat dan lebih humanis	Memengaruhi persepsi migran terhadap peluang masuk ke AS
Remain in Mexico	Diterapkan penuh sejak 2019	Dihentikan lalu diaktifkan kembali	Menimbulkan ketidakpastian kebijakan
Zero Tolerance Policy	Diterapkan	Dihentikan	Mengurangi pemisahan keluarga migran
Tembok Perbatasan	Diperluas	Dihentikan	Perubahan arah kebijakan perbatasan
Kebijakan Suaka	Pembatasan akses suaka	Evaluasi dan perluasan akses	Peningkatan pencari suaka
Deportasi Migran	Deportasi massal	Deportasi selektif	Perdebatan politik domestik

Sumber: Diolah dari *Peterson Institute for International Economics* (PIIE), 2024.

Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kebijakan imigrasi Donald Trump dan Joe Biden dalam menangani migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Pemerintahan Trump cenderung menerapkan pendekatan yang restriktif dan berorientasi pada keamanan melalui penerapan penuh kebijakan *Remain in Mexico*, *Zero Tolerance Policy*, perluasan

tembok perbatasan, pembatasan akses suaka, serta deportasi massal. Sebaliknya, pemerintahan Biden mengadopsi pendekatan yang relatif lebih humanis dengan menghentikan beberapa kebijakan era Trump, memperluas akses suaka, menghentikan pembangunan tembok perbatasan, serta menerapkan deportasi secara lebih selektif (PIIE, 2024). Perbedaan orientasi kebijakan tersebut memengaruhi dinamika krisis migrasi, mulai dari perubahan persepsi migran terhadap peluang masuk ke Amerika Serikat, meningkatnya jumlah pencari suaka, munculnya ketidakpastian terkait implementasi *Remain in Mexico*, hingga perdebatan politik domestik mengenai efektivitas pengelolaan migrasi dan keamanan perbatasan.

Pada awal pemerintahannya, Joe Biden menangguhkan implementasi kebijakan *Remain in Mexico* pada 20 Januari 2021 dan secara resmi menghentikan pendaftaran baru program tersebut pada 1 Juni 2021. Dengan keputusan tersebut, kebijakan *Remain in Mexico* tidak lagi diterapkan terhadap pencari suaka baru yang datang ke perbatasan Amerika Serikat-Meksiko (DHS, 2021). Akan tetapi, periode tersebut berlangsung bersamaan dengan tingginya arus migrasi di wilayah perbatasan selatan Amerika Serikat. Data CBP menunjukkan bahwa jumlah *encounters* di perbatasan selatan mencapai lebih dari 1,7 juta kasus pada tahun fiskal 2021 dan meningkat menjadi sekitar 2,76 juta kasus pada tahun fiskal 2022 (CBP, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap kapasitas detensi migran, proses administrasi suaka, serta pengawasan perbatasan.

Peningkatan arus migrasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan sosial di Meksiko serta negara-negara Amerika Tengah. Harapan terhadap kebijakan imigrasi Joe Biden yang dinilai lebih manusiawi juga

menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya arus migran. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pemerintah Amerika Serikat dalam hal kapasitas penahanan, proses pengajuan suaka, dan pengelolaan keamanan perbatasan (Putri dan Yuniarti, 2025). Dalam kondisi tersebut, efektivitas *Remain in Mexico* menjadi penting untuk dianalisis guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selama masa ketika kebijakan *Remain in Mexico* tidak aktif, yaitu sejak 1 Juni 2021 hingga awal Desember 2021, pemerintah Amerika Serikat menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan migrasi. Pusat penahanan migran mengalami *overkapasitas*, proses administrasi suaka menjadi semakin lambat, dan pemerintah federal menghadapi tekanan politik dari negara bagian perbatasan seperti Texas dan Missouri yang menilai pencabutan *Remain in Mexico* memperburuk kondisi migrasi. Pada periode ini, peningkatan jumlah migran tanpa dokumen juga diiringi dengan kekhawatiran terhadap keamanan perbatasan, perdagangan manusia, serta aktivitas penyelundupan narkoba lintas negara (PBS News, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya berbagai persoalan yang berlangsung secara bersamaan dalam pengelolaan migrasi dan keamanan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

Meskipun pemerintahan Biden sejak awal berupaya menghentikan kebijakan *Remain in Mexico*, berbagai tantangan di perbatasan serta gugatan hukum dari negara bagian Texas dan Missouri mendorong munculnya tekanan politik dan hukum yang semakin besar terhadap pemerintah. Tekanan tersebut berujung pada putusan pengadilan federal Amerika Serikat yang memerintahkan pemerintahan Biden untuk mengaktifkan kembali program *Remain in Mexico*. Menanggapi

putusan tersebut, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, menyatakan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan pengadilan sambil tetap menempuh proses hukum untuk membatalkannya. Dalam wawancaranya dengan CBS News, Mayorkas menyatakan, "*We're planning to implement the program while we litigate the ruling*" (CBS News, 2021).

Pada kesempatan yang sama, Mayorkas juga mengkritik kondisi para migran yang terdampak kebijakan tersebut dengan menyebut bahwa kamp migran di Matamoros menunjukkan kondisi yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan kepentingan individu yang mencari perlindungan kemanusiaan berdasarkan hukum Amerika Serikat (CBS News, 2021). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kembali *Remain in Mexico* berlangsung dalam lingkungan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan. Pemerintah Biden harus merespons kewajiban hukum sekaligus mempertahankan orientasi kebijakan yang menekankan perlindungan kemanusiaan. Dengan demikian, perubahan status *Remain in Mexico* tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis kebijakan, tetapi juga dengan dinamika aktor dan kepentingan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan tersebut, pemerintah Amerika Serikat secara resmi kembali mengimplementasikan kebijakan *Remain in Mexico* pada 6 Desember 2021 dengan sejumlah revisi prosedural dan klaim peningkatan perlindungan kemanusiaan bagi pencari suaka (CMS, 2021). Perubahan tersebut mencakup percepatan proses persidangan imigrasi, perluasan akses bantuan hukum, serta pengecualian bagi kelompok rentan dari program *Remain in Mexico*.

Meskipun demikian, implementasi kembali kebijakan ini tetap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai instrumen untuk mengendalikan lonjakan migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Di sisi lain, berbagai organisasi hak asasi manusia terus mengkritik dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya terhadap para pencari suaka. Situasi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kembali *Remain in Mexico* tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan migrasi, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan keamanan perbatasan, pertimbangan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kontroversi mengenai efektivitas dan dampak kemanusiaan kebijakan tersebut terus berlanjut setelah implementasinya kembali dilakukan. Pemerintahan Biden tetap berupaya mengakhiri *Remain in Mexico* karena dinilai tidak sejalan dengan agenda reformasi imigrasi yang lebih humanis. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 30 Juni 2022 memutuskan bahwa pemerintahan Biden memiliki kewenangan hukum untuk mengakhiri program *Remain in Mexico* (PBS News, 2022). Berdasarkan putusan tersebut, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat secara resmi menghentikan implementasi kebijakan tersebut pada 8 Agustus 2022 (Human Rights First, 2022).

Dinamika penghentian, pengaktifan kembali, hingga penghentian permanen *Remain in Mexico* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan migrasi pada era Joe Biden berlangsung dalam kondisi yang dipengaruhi oleh proses hukum, perubahan orientasi kebijakan, tekanan politik domestik, serta pertimbangan

keamanan dan kemanusiaan. Dalam perspektif *Foreign Policy Analysis* (FPA), kondisi tersebut penting untuk melihat bagaimana faktor dan dinamika yang berada di sekitar proses pengambilan keputusan pemerintah dapat memengaruhi arah serta pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, FPA digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan pendukung untuk menjelaskan konteks pengambilan keputusan, sedangkan efektivitas kebijakan tetap dianalisis menggunakan konsep Underdal.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan publik sering kali muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial dan situasi krisis yang menuntut pemerintah untuk bertindak cepat dan adaptif (Arafat, 2023). Dalam konteks kebijakan imigrasi Amerika Serikat, peningkatan arus migran di wilayah perbatasan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali strategi penanganan migrasi, termasuk mengevaluasi kebijakan *Remain in Mexico* sebagai bagian dari respons terhadap dinamika krisis kemanusiaan yang terus berkembang. Dinamika kebijakan imigrasi di era Joe Biden menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan perbatasan, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan politik, proses hukum, serta pertimbangan kemanusiaan. Pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan pengelolaan keamanan perbatasan dengan pendekatan terhadap pencari suaka yang lebih humanis.

Adapun pada periode 2021–2024, perbatasan Amerika Serikat-Meksiko mengalami peningkatan jumlah *migrant encounters*, terutama pada tahun-tahun awal pemerintahan Biden. Berdasarkan data CBP, jumlah *encounters* di *Southwest Land Border* meningkat dari 1.659.206 pada tahun fiskal 2021 menjadi 2.378.944

pada tahun fiskal 2022 dan mencapai 2.475.669 pada tahun fiskal 2023. Pada tahun fiskal 2024, jumlah tersebut menurun menjadi 2.135.005, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun fiskal 2021. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa periode pemerintahan Biden berlangsung bersamaan dengan tingginya volume kedatangan migran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko (Chishti dkk., 2024). Kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan penanganan terhadap migran yang datang untuk mengajukan suaka maupun memperoleh perlindungan kemanusiaan, serta memberikan tekanan terhadap kapasitas sistem imigrasi Amerika Serikat.

Peningkatan arus migrasi juga menimbulkan berbagai persoalan keamanan lintas batas seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aktivitas kartel kriminal di wilayah perbatasan Amerika Serikat-Meksiko (CBP, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa isu migrasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan nasional dan stabilitas kawasan perbatasan. Dalam konteks tersebut, peningkatan kasus kriminalitas di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3 Kasus Kriminal Terkait Migrasi di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko Tahun 2021–2024

Tahun Fiskal	*Encounter* Migran	Kasus *Drug Trafficking*	Kasus *Human Trafficking*
2021	±655.000	±1.800 kasus	±1.200 kasus
2022	±808.000	±2.200 kasus	±1.500 kasus
2023	±717.000	±2.500 kasus	±1.800 kasus
2024*	±600.000+	±2.700 kasus	±2.000 kasus

*Data Tahun 2024 masih bersifat sementara/estimasi awal berdasarkan laporan CBP dan DHS.
Sumber: CBP, 2021-2024; DHS, 2021-2024.

Berdasarkan Tabel 1.3, jumlah kasus kriminal yang berkaitan dengan migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2021–2024. Peningkatan jumlah *encounter* migran dari sekitar 655.000 kasus pada tahun fiskal 2021 menjadi lebih dari 600.000 kasus pada tahun fiskal 2024 diikuti dengan kenaikan kasus *drug trafficking* dari sekitar 1.800 kasus menjadi 2.700 kasus, serta kasus *human trafficking* dari sekitar 1.200 kasus menjadi 2.000 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa tingginya mobilitas migran di kawasan perbatasan turut diiringi dengan meningkatnya aktivitas kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan narkotika dan perdagangan manusia (CBP, 2024).

Berdasarkan dinamika tersebut, peningkatan arus migrasi dan berbagai tekanan terhadap sistem pengelolaan perbatasan tidak secara langsung dapat dipandang sebagai akibat dari satu kebijakan tertentu. Kondisi migrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari negara asal migran, kebijakan Amerika Serikat, kondisi di Meksiko, maupun dinamika regional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak

menempatkan *Remain in Mexico* sebagai satu-satunya faktor penyebab perubahan kondisi migrasi, tetapi menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact* sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun dari penelitian sebelumnya yaitu "Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Imigran pada Masa Pemerintahan Presiden Joe Biden" oleh Shallom Elzeta Putri dan Yuniarti (2025) serta penelitian "Implementasi Kebijakan Imigrasi Presiden Joe Biden di Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko Periode 2021–2022" oleh Ghofur Alhaj Ardli (2023), kajian yang ada masih berfokus pada aspek kemanusiaan, perlindungan migran, dan implementasi kebijakan imigrasi pada era Joe Biden. Sementara itu, penelitian "Efektivitas Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon pada Periode 2020–2021" oleh Annisa Avrilia (2023) membahas efektivitas dalam konteks organisasi internasional dan penanganan pengungsi.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden, terutama setelah kebijakan tersebut mengalami penghentian, pengaktifan kembali, dan penghentian permanen. Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas Underdal (1992) untuk menilai pencapaian kebijakan melalui *output*, *outcome*, dan *impact*. Sementara itu, pendekatan FPA digunakan sebagai pendekatan pendukung untuk menjelaskan bagaimana dinamika pengambilan keputusan, tekanan politik, proses hukum, serta pertimbangan keamanan dan kemanusiaan memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian mengenai efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden menjadi penting karena kebijakan ini berada pada persimpangan antara kepentingan keamanan nasional, tekanan politik domestik, proses hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan status kebijakan yang sempat dihentikan, diaktifkan kembali, dan akhirnya dihentikan menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan imigrasi Amerika Serikat dalam menangani krisis migran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis sejauh mana *Remain in Mexico* mampu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan kebijakan serta bagaimana dinamika pengambilan keputusan pemerintahan Biden turut memengaruhi pencapaian efektivitas tersebut selama periode 2021–2024.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Masalah penelitian yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya dinamika pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan *Remain in Mexico* pada era Joe Biden yang ditandai dengan penghentian, pengaktifan kembali, dan penghentian kembali kebijakan tersebut dalam periode 2021–2024.
2. Tingginya arus migran dan pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko selama pemerintahan Joe Biden yang menimbulkan berbagai tantangan dalam penanganan krisis migran.

3. Adanya tantangan keamanan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aktivitas kriminal transnasional lainnya dalam konteks pengelolaan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas kebijakan *Remain in Mexico* pada era Presiden Joe Biden periode 2021–2024 dalam mengelola arus imigran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, dengan menelaah implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta keterkaitannya dengan isu hak asasi manusia dan keamanan nasional. Periode tersebut dipilih karena mencakup seluruh dinamika kebijakan, mulai dari penghentian, implementasi kembali, hingga penghentian permanennya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penanganan krisis imigran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko melalui kebijakan *Remain in Mexico* era Joe Biden?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan *Remain in Mexico* diimplementasikan pada era pemerintahan Presiden Joe Biden.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam

subkajian Keamanan Internasional, melalui pemahaman mengenai efektivitas kebijakan imigrasi dalam menangani krisis migran serta keterkaitannya dengan keamanan perbatasan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan *Remain in Mexico*, kebijakan imigrasi Amerika Serikat, serta dinamika penanganan migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan *Remain in Mexico* serta kebijakan terkait dalam menangani krisis migran di perbatasan kedua negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam pengelolaan arus migrasi, keamanan perbatasan, dan perlindungan hak-hak migran, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan penanganan migrasi yang lebih adaptif terhadap dinamika di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.